

**JAMINAN INDUSTRI HALAL LUAR NEGERI
(Malaysia, Brunei Darussalam, Turkey)**

**FOREIGN HALAL INDUSTRY GUARANTEE
(Malaysia, Brunei Darussalam, Turkey)**

Dedek rakhilia¹, Malahayatie²

Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe

rakhilia60@gmail.com¹, malahayatie@iainlhokseumawe.ac.id²

Abstrak

Industri halal telah berkembang menjadi sektor ekonomi yang signifikan di banyak negara, terutama di mana mayoritas tenaga kerjanya adalah Muslim. Artikel ini membahas industri halal di tiga negara. Malaysia, Brunei Darussalam, dan Turki yang dianggap sebagai pemimpin dalam standar internasional dan sertifikasi halal. Melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Malaysia telah mengembangkan standar halal yang komprehensif, menjadikannya pusat global sertifikasi halal. Melalui Majelis Uagama Islam Brunei (MUIB), Brunei Darussalam juga menetapkan pedoman ketat untuk memastikan bahwa barang-barang yang dijual di dalam negeri dan internasional mematuhi hukum Islam. Namun, Turki, melalui Diyanet Urusan Agama Turki, fokus tidak hanya pada kualitas makanan tetapi juga memperluas komitmen mereka terhadap sektor pariwisata dan keuangan. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Salah satu isu utama yang diangkat oleh penelitian ini adalah bagaimana ekonomi global mengalami pertumbuhan industri halal. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan tematik. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dapat diperoleh langsung dari sumber primer, yaitu literatur literatur yang berfokus pada industri halal dalam perdagangan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan dan mengetahui bagaimana industri halal di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Turkey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri Islam di seluruh dunia melihat pertumbuhan yang signifikan di setiap negara Muslim, dan bahkan di negara-negara non-Muslim.

Kata kunci : Industri halal, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Turkey

Abstract

The halal industry has developed into a significant economic sector in many countries, especially where the majority of the workforce is Muslim. This article discusses the halal industry in three countries. Malaysia, Brunei Darussalam, and Türkiye are considered leaders in international

standards and halal certification. Through Jabatan Progress Islam Malaysia (JAKIM), Malaysia has developed comprehensive halal standards, making it a global center for halal certification. Through the Brunei Islamic Religious Council (MUIB), Brunei Darussalam has also established strict guidelines to ensure that goods sold domestically and internationally comply with Islamic law. However, Türkiye, through the Turkish Religious Affairs Diyanet, is focusing not only on food quality but also expanding their commitment to the tourism and financial sectors. This research method is a qualitative method. One of the main issues raised by this research is how the global economy is experiencing the growth of the halal industry. This research is based on library research using a thematic approach. The primary data used in this research is data that can be obtained directly from primary sources, namely literature that focuses on the halal industry in international trade. The aim of this research is to compare and find out how the halal industry is in Malaysia, Brunei Darussalam and Turkey. The results of this research indicate that the Islamic industry worldwide is seeing significant growth in every Muslim country, and even in non-Muslim countries.

Keywords : *Halal industry, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Turkey*

Pendahuluan

Industri halal sering dikaitkan dengan suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk (barang dan jasa) yang sesuai dengan ketentuan agama Islam (syariah). Definisi ini mulai muncul akhir-akhir ini karena ramainya permintaan produk dan jasa halal di dunia. Sebelumnya, diketahui bahwa industri halal dikaitkan dengan ekonomi halal, dimana penyebutan ekonomi halal jauh lebih dulu dikenal dari pada industri halal. Sementara itu, definisi industri halal dalam bahasa sederhana terdiri dari dua kata: halal dan industri. Seperti yang dinyatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), industri didefinisikan sebagai proses pembuatan barang dengan menggunakan alat dan bahan, sepertimesin. Sedangkan halal didefinisikan sebagai sesuatu yang diizinkan (tidak dilarang oleh syariah). Sehingga Industri halal diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah.(Saepudin, 2022).

Kondisi pasar global saat ini telah muncul karena tuntutan dan preferensi banyak orang Muslim di seluruh dunia, yang telah mengakibatkan persaingan

ketat dalam perekonomian. Ini menciptakan peluang bagi bisnis, terutama di pasar yang masih berkembang, untuk menuai keuntungan dari penjualan produk halal. Sektor ini (industri halal) semakin menarik perhatian dari pembuat kebijakan dan pemilik bisnis sebagai industri dengan potensi pertumbuhan yang terus meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa industri halal telah mempengaruhi banyak negara, seperti Thailand, Singapura, dan Filipina, yang memiliki harga produk halal yang kuat. Negara-negara lain, seperti Australia dan Amerika Serikat, juga mengakui ini sebagai peluang untuk menjadi produsen produk halal. (Adinugraha, 2022).

Kualitas halal tidak sekedar terkait dengan standar kualitas suatu produk, namun merupakan preferensi seseorang. Secara ilmiah produk halal terbukti memiliki standar produk dengan kualitas sehat dan bersih sehingga produk halal tidak hanya untuk umat muslim tetapi juga non-muslim. Inilah yang mendorong negara-negara non-muslim menciptakan negaranya ramah muslim dengan turut mengembangkan industri halalnya. Ruang lingkup tidak hanya tentang sektor makanan saja tetapi juga pada sektor farmasi, pariwisata, kosmetik dan juga *fashion*. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, secara alami mengalihkan fokusnya pada industri halal. Namun, bahkan negara-negara dengan minoritas Muslim juga mulai tertarik pada industri halal, mengingat potensi ekonomi dan kesejahteraan yang ditawarkannya kepada masyarakat. (Setyaningsih, 2022).

Moenip melakukan penelitian pada tahun 2006 tentang perbandingan standar labelisasi halal dan sistem hukum yang mengatur sistem halal di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Temuannya menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut memiliki standar yang hampir sama. Penelitian lain oleh Ghazali dan Sawari (2014) memfokuskan pada praktik standar halal di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Singapura. Meskipun setiap negara memiliki karakteristik unik dalam menerapkan standar halal, tetapi dasar acuan mereka adalah Al-Quran dan Hadits. Ghazali dan Sawari juga menyoroti kecenderungan pemerintah

Malaysia dan Brunei untuk memberikan prioritas pada aturan standar halal, sehingga sistem halal di kedua negara tersebut memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Penelitian lain oleh Othman Baharudin pada tahun 2016 memperluas cakupan perbandingan standar halal ke lebih banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Hasilnya menunjukkan perbedaan dalam infrastruktur dan teknologi yang digunakan untuk menerapkan standar halal di antara negara-negara tersebut.

Penelitian ini dilakukan karena banyak negara memiliki peraturan dan standar yang berbeda mengenai sertifikasi halal. Mengamati industri Islam dapat membantu bisnis dalam memahami dan mematuhi peraturan yang relevan, sehingga memfasilitasi perdagangan dan menyelesaikan masalah hukum. Pasar global untuk produk halal terus berkembang karena meningkatnya permintaan dari orang-orang Muslim di seluruh dunia. Produsen dapat lebih mudah memasuki pasar internasional dan meningkatkan penjualan mereka dengan melakukan penelitian dan memastikan bahwa produk mereka halal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan tematik. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber utama, yaitu buku dan jurnal yang membahas industri halal. Metode pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis adalah deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

A. Jaminan Industri Halal Malaysia

Masalah kehalalan di Malaysia mengalami perkembangan serupa dengan yang terjadi di Indonesia, sehingga menyebabkan pembentukan sebuah badan

yang disebut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). JAKIM bertindak sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan Islam, termasuk proses sertifikasi halal. Namun, proses sertifikasi halal Malaysia ini berada di bawah lingkup pemerintah. Malaysia memiliki ekosistem yang kuat, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung kemajuan Malaysia dalam memproduksi barang dan jasa halal. Malaysia bahkan telah melangkah lebih jauh dengan mengembangkan sistem sertifikasi halal yang dianggap sebagai standar dunia. Malaysia telah menetapkan standar halal global, sertifikasi halal terakreditasi di seluruh dunia, memenuhi akreditasi halal. (Setyaningsih, 2022).

Di Malaysia, upaya untuk melindungi konsumen Muslim terus berkembang. Pemerintah membentuk sebuah komite (*Commite on evaluation of foods, drinks, and goods*) untuk mengevaluasi makanan, minuman, dan barang yang digunakan oleh konsumen Muslim pada tahun 1982. Komite ini berada di bawah Bagian Hal Ehwah Islam (*Islamic Affairs Division*). Tugas komite tersebut adalah memeriksa dan memberikan label halal kepada produsen, distributor, dan importir pangan. Bagian Urusan Islam kemudian diubah menjadi Departemen Urusan Islam yang terpisah dari kantor perdana menteri. Departemen baru ini, yang dikenal sebagai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), bertanggungjawab untuk memeriksa dan mengawasi kehalalan produk makanan. Namun, untuk produk yang akan dijual di dalam negeri, sertifikasi halal dapat dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN), sementara produk yang dijual di luar negeri harus disertifikasi oleh JAKIM. Sertifikasi halal Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM dikenal di seluruh dunia dan logo mereka diakui secara internasional karena industri halal Malaysia yang kuat dalam sektor manufaktur dan pemasaran produk halal. Dukungan pemerintah Malaysia telah memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara mitra utama, terutama yang membutuhkan produk halal. (Atiah & Fatoni, 2019).

Logo Industri Halal Malaysia :



Sumber : detikfood, 2012

Di Malaysia, hukum, adat istiadat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan standar Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan keyakinan Islam sebagai mana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma para ulama. Di antara undang-undang yang berkaitan dengan standar Islam Malaysia adalah Undang-Undang Perihal Dagangan (APD) tahun 2011. Mulai Januari 2012, semua kontrol didasarkan pada standar halal APD (2011), yang mencakup poin-poin berikut:

- a. Organisasi yang bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi halal di Malaysia adalah Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Sertifikasi yang diberikan oleh JAKIM dan MAIN saja tidak sah untuk perdagangan dalam negeri maupun internasional.
- b. Memanfaatkan simbol atau ayat apa pun dari Al-Quran dapat membingungkan umat Islam dilarang, terutama jika restoran yang dimiliki oleh non-Muslim.
- c. Produk yang diekspor ke Malaysia hanya akan menggunakan lambang negara Malaysia atau negara lain yang telah disetujui oleh JAKIM. Misalnya, logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus digunakan untuk produk Indonesia.
- d. Nama lembaga sertifikasi halal harus ditampilkan di samping logo halal.

Sementara itu, seiring pertumbuhan industri halal di Malaysia, pemerintah Malaysia mendirikan Pusat Pengembangan Halal (HDC), yang didirikan dengan

tujuan mempromosikan Malaysia sebagai pusat global untuk halal. Di antara tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan standar halal, termasuk prosedur audit dan sertifikasi, dan untuk mendukung pertumbuhan industri halal dalam hal penjualan produknya di pasar internasional.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, industri halal Malaysia sudah berkembang lebih lambat. Penyebutan pertama sertifikasi halal sudah ada sejak hampir 50 tahun yang lalu. Dan setelah itu, Malaysia terus meningkatkan standar halal mereka melalui Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*). Pemerintah dukungan juga tinggi. Hal ini dibedakan oleh upaya pemerintah nasional untuk mempertahankan ekosistem halal yang sehat. Badan perwakilan negara tersebut adalah *Halal Development Center*. Sampai sekarang, Malaysia adalah negara berkembang dengan populasi mayoritas Muslim. Pada tahun 2021, PDB per kapita Malaysia akan mencapai USD 11.109, atau USD 372,98 juta, secara global (Ekonomi di Malaysia Dibandingkan dengan UE, n.d.). Ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki peringkat ke-39 dalam ekonomi global. Sebaliknya, menurut Departemen Luar Negeri AS (2022), populasi keseluruhan Malaysia adalah 33,9 juta (per 2022), dengan 63,5% adalah penduduk asli (Fatonah et al., 2023). Malaysia telah lama menjadi pusat halal global, dengan regulasi halal yang diterapkan sejak tahun 1970-an. Pada masa itu, masyarakat Muslim Malaysia membutuhkan jaminan terhadap kehalalan makanan, minuman, dan produk impor yang beredar di negara tersebut. Sebagai respons, Parlemen Malaysia mengesahkan Deed 87/1972 sebagai undang-undang yang mengatur masalah halal.

Malaysia unggul dalam industri makanan halal dibandingkan dengan Indonesia karena memiliki manajemen pemerintahan yang baik dan *branding* yang kuat. Meskipun kedua negara memiliki sertifikasi halal terbaik di dunia, Malaysia memiliki regulasi halal yang lebih matang dan dikelola dengan baik oleh pemerintahnya jika dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini memungkinkan Malaysia untuk menarik investor atau mitra kerjasama dengan lebih mudah.

Selain itu, dalam hal *branding*, Malaysia juga lebih unggul dari pada Indonesia. Dengan fokusnya menjadi pusat halal global, langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia sesuai dengan kondisi dan kompetensinya.

B. Jaminan Industri Halal Brunei Darussalam

Brunei adalah suatu negara yang menerapkan konsep Melayu Islam Beraja dengan mengimplementasikan hukum Syariah. Di dalam rencana pembangunan Nasional ke-9 (2007-2012), industri halal diangkat sebagai salah satu sumberdaya untuk pembangunan. Pentingnya industri makanan halal ditekankan melalui brand 'Brunei Halal' yang memverifikasi keaslian produk makanan halal. Langkah ini secara resmi diakui pada bulan Agustus 2007 dengan dukungan dari berbagai lembaga pemerintah seperti Kementerian Sumber Daya Industri dan Primer, Dewan Agama Islam Brunei Darussalam, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Tindakan pemerintah tidak hanya terfokus pada industri makanan halal, tetapi juga pada pengembangan keseluruhan sektor industri halal atau peningkatan lebih lanjut dalam industri halal di Brunei. (Rosalina, 2020).

Sistem sertifikasi global yang paling komprehensif adalah sistem sertifikasi halal di Brunei. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah dan staf Majelis Ujama Islam Brunei (MUIB), ini yang membuat standar Brunei dihormati oleh negara lain, termasuk Jepang. Karena populasi Muslim Brunei hanya mengkonsumsi makanan halal karena agama. Namun, konsumen non-Muslim menganggap produk halal lebih murni dan aman. Hal ini menimbulkan hambatan dalam bisnis ekspor-impor halal. Malaysia menyatakan bahwa setiap negara yang berpartisipasi dalam perdagangan halal internasional harus memperlakukan masalah ini dengan serius dan komprehensif. (Setyaningsih, 2022).

Pengembangan industri halal di Brunei Darussalam dimulai pada tahun 2009 dengan pembentukan Kementerian Agama, yang bekerjasama dengan Kantor Perdana Menteri dan Kementerian Agama. Akhirnya, pada tahun 2010,

Brunei secara resmi memperkenalkan merek halal nasional yang merupakan bagian dari pertumbuhan industri halal dan dikenal dengan nama BHB, atau lebih bahasa sehari-hari, "Halal Brunei."

Sertifikasi halal Brunei Darussalam dikenal sebagai "Brunei Halal" dan dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yang juga didukung oleh Kementerian Perindustrian dan Energi. Selain itu, rajin Kementerian Kesehatan bekerja untuk mengevaluasi dungan dalam setiap produk yang akan didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga kesehatan. Sementara Kementerian Agama memiliki tanggung jawab untuk menerapkan label halal untuk setiap produk dan bekerjasama dengan Kementerian Urusan Islam Brunei (MUIB), Kementerian Energi dan Industri memiliki tanggung jawab untuk memasarkan produk yang dimaksud. Departemen Urusan Syariah dalam Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) adalah salah satu organisasi dengan pengalaman paling banyak dalam memberikan sertifikasi halal di Brunei Darussalam. Departemen JHES mengawasi Divisi Keamanan Makanan Halal, yang memberikan informasi spesifik tentang makanan halal di Brunei Darussalam. Salah satu produk makanan halal yang dihasilkan divisi ini adalah halal dough. Divisi tersebut menetapkan bahwa pekerja asing yang memasuki Brunei harus memiliki sertifikasi halal yang dikonfirmasi oleh MUIB agar dapat dipekerjakan secara sah di seluruh Brunei Darussalam. Selain itu, divisi ini juga sangat bangga dalam melakukan audit halal bagi pelanggan yang ingin menerima atau telah menerima sertifikasi halal dari MUIB. (Nuzulia, 1967).

Logo Industri Halal Brunei Darussalam :



Sumber : *detikedu*, 2022

Pemerintah telah membentuk Bio Innovation Corridor (BIC) yang merupakan pelabuhan halal atau alternatif disebut sebagai hub pengembangan dan penelitian industri halal. BIC diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian dan Perdana Menteri dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian tentang produk halal, Melakukan analisis terhadap produk halal sebelum memberikan sertifikasi dan persetujuan, menyediakan infrastruktur dan utilitas dasar untuk mendukung investor yang tertarik berinvestasi karena mereka berada dalam bisnis halal. Di Brunei Darussalam, terdapat sebuah pusat bernama Pusat Sains dan Metrologi Halal (*Science and Metrology Centre*) yang dibangun oleh Kementerian Energi dan Industri. Pusat ini menjalin kerjasama dengan Universitas Osaka dan Laboratorium Penelitian Makanan Jepang. Di pusat riset tersebut, setiap produk yang ingin disertifikasi halal akan mengalami analisis DNA untuk memastikan kehalalannya dan kebebasannya dari kontaminasi. Proses analisis ini dijalankan dengan ketat selama proses audit, sehingga proses sertifikasi halal di Brunei memiliki perbedaan dengan negara lain. Saat ini, tidak ada biaya yang dibebankan untuk pengujian bagi para pemohon.

Pemerintah Brunei Darussalam memiliki kebijakan sertifikasi halal yang lebih ketat dan canggih jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Proses penerbitan sertifikat halal sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Agama.

Otoritas yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat halal adalah JHES yang berada di bawah naungan MUIB. Sebagai langkah untuk kepentingan bersama, pemerintah telah mengambil kebijakan di mana kewenangan penerbitan sertifikat halal sepenuhnya diambilalih oleh negara.

C. Jaminan Industri Halal Di Turkey

Sejarah Turki sebagai bagian yang sangat maju dari kekaisaran Utsmaniyah, berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan industri Halal modern. Tradisi Islam yang kuat dan abadi memberikan pondasi yang kuat bagi industri halal. Pada awal 2000-an, permintaan global untuk produk halal diperkirakan akan meningkat. Turki, dengan populasi mayoritas Muslim dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam industri ini. Pendirian badan sertifikasi halal dan peraturan ketat terkait produksi dan distribusi produk halal as pemerintah Turki mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatur industri halal. Kota-kota seperti Istanbul, Izmir, dan Ankara adalah pusat utama untuk produksi dan perdagangan barang-barang halal. Infrastruktur dan aksesibilitas global juga berperandalam pertumbuhan industri ini. Industri halal Turki menjadi semakin menonjol dalam ekonomi global, dan produk mereka menjadi lebih terkenal dan diminati pasar internasional.(Rahmawati et al., 2022).

Di negara-negara Islam seperti Uni Emirat Arab, Turki, dan dunia Arab, pelaksanaan JPH diawasi oleh organisasi Islam nasional, bukan oleh pemerintah nasional. Tindakan serupa dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Australia, Belgia, Belanda, dan Amerika Serikat, di mana komite urusan agama bertanggung jawab atas komite pendidikan agama.(Sayekti, 2014). Turki telah mengadopsi undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi produksi dan distribusi barang halal. Ini mempengaruhi standar produksi, bahan baku, alur kerja, dan sertifikasi. Ada lembaga sertifikasi halal yang beroperasi di Turki. Organisasi-organisasi ini memberikan sertifikasi untuk produk yang memenuhi standar halal yang ditetapkan. Di Turki, ada pendidik khusus yang mengabdikan diri untuk memastikan bahwa industri mematuhi prinsip-prinsip halal. Mereka

mempraktikkan standar halal dan identifikasi pedoman. Ketidaksetujuan publik terhadap produk halal Turki juga memberi motivasi bisnis untuk meningkatkan standar mereka sendiri untuk produksi halal. (Gunawan et al., 2022)

Di Turki, otoritas khusus yang paling berdedikasi untuk mengawasi industri halal adalah "Kepresidenan Urusan Agama" atau "*Diyanet İşleri Başkanlığı*" dalam bahasa Turki. Meskipun awal otoritas ini diarahkan pada urusan keagamaan dan kegiatan keagamaan terkait, seperti pengawasan halal, mereka juga melakukan upaya untuk mengembangkan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam industri makanan dan minuman Turki. Pemerintah Turki mulai menerapkan kampanye pariwisata halal pada tahun 2020. Kebijakan semacam ini merupakan cara untuk meningkatkan potensi lembaga pendidikan di Turki yang memiliki banyak contoh kejayaan era Ottoman di Turki. Produktivitas di sektor wisata halal akan meningkatkan jumlah produk halal. Hal tersebut dikarenakan wisata halal merupakan salah satu instrument yang dapat menjadi gerbang bagi konsumen produk halal. Angka konsumsi produk halal dipicu oleh meningkatnya populasi penduduk beragama Islam di suatu Negara. (Arifin, 2023).

Logo *Diyanet İşleri Başkanlığı* :



Sumber : *mumurlar.net*

Industri halal Turki berkembang pesat dan menjadi lebih khusus untuk memenuhi standar halal internasional. Pemerintah Turki telah mengembangkan

strategi untuk mempromosikan industri halal, termasuk sertifikasi halal, pengembangan produk halal, dan fasilitas ekspor halal. Namun, seperti di negara lain, akan selalu ada perbaikan dan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keamanan dan pertumbuhan ekonomi Turki yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Industri halal adalah produk yang sesuai dengan ketentuan agama Islam (syariah). Definisi industri halal dalam bahasa sederhana terdiri dari dua kata: halal dan industri. Kondisi pasar global telah muncul karena tuntutan dan preferensi banyak orang Muslim di seluruh dunia, yang mengakibatkan persaingan ketat dalam perekonomian. Industri halal mempengaruhi banyak negara, seperti Thailand, Singapura, dan Filipina, yang memiliki harga produk halal yang kuat. Negara-negara lain, seperti Australia dan Amerika Serikat, juga mengakui ini sebagai peluang untuk menjadi produsen produk halal. Kualitas halal tidak sekedar terkait dengan standar kualitas suatu produk, namun merupakan preferensi seseorang.

Industri makanan Malaysia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, sama dengan Indonesia, yang mengarah pada pembentukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). JAKIM bukanlah badan dengan monopoli pada semua aspek halal, melainkan sistem yang dipimpin pemerintah untuk sertifikasi halal. Malaysia telah mengembangkan sistem global untuk sertifikasi halal, memastikan sertifikasi halal di semua negara.

Brunei, negara yang menjunjung tinggi hukum Islam, telah menerapkan industri halal sebagai komponen kunci dari rencana pembangunan nasionalnya. Merek 'Brunei Halal' digunakan untuk memverifikasi keaslian produk makanan halal. Pemerintah telah menerapkan sistem sertifikasi global yang komprehensif, melibatkan berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MUIB).

Sejarah Turki sebagai tokoh utama pada zaman Kekaisaran Utsmaniyah berperan penting dalam kemajuan industri Halal modern. Dengan jumlah Muslim yang besar di negara tersebut dan keterbatasan sumberdaya pertanian, Turki memiliki potensi yang besar dalam industri ini. Pemerintah telah mengambillangkah-langkah untuk mendorong produksi dan distribusi produk Halal, serta meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas globalnya. Kota-kota seperti Istanbul, Izmir, dan Ankara menjadi pusat utama produksi dan distribusi produk Halal. Di Turki, entitas yang paling berpengaruh dalam memajukan industri halal adalah "Kepresidenan Urusan Agama" atau "*Diyanet İşleri Başkanlığı*". Meskipun mereka awalnya fokus pada praktik keagamaan dan kegiatan terkait, seperti pengawasan halal, namun mereka juga aktif dalam mengupayakan penguatan dan penegakan prinsip-prinsip Islam dalam sector makanan dan minuman.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H. (2022). *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*. Scientist Publishing.
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Atiah, I. N., & Fatoni, A. (2019). Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia. *Syî'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(2), 37. <https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6585>
- Fatonah, I., Trihartono, A., & Hara, A. E. (2023). Industri Makanan Halal: Perbandingan Indonesia dan Malaysia. *Global Focus*, 3(2), 110–123. <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2023.003.02.3>
- Gunawan, S., Rakhmawati, N. A., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., Pradhana, Y. W., & Prabowo, A. (2022). Merajut Ekosistem Industri Halal

- dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar. *Sewagati*, 6(4), 1–10. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i4.110>
- Nuzulia, A. (1967). Pengaturan Jaminan Pangan Halal Berbasis Asas Keagamaan Dan Keselamatan Konsumen. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Rahmawati, Husni Thamrin, & Zulfadli Nugraha Triyan Putra. (2022). Overview Industri Halal di Perdagangan Global. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 72–81. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657)
- Rosalina, A. (2020). Strategi Brunei Darussalam Dalam Mengembangkan Industri Pangan Halal Menghadapi Pasar Halal Global. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 7(2), 1–23.
- Saepudin, E. (2022). Ekosistem Industri Halal. In *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* (Vol. 5). <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.420>
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.(November), 193–209. <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>
- Setyaningsih, R. P. (2022). Isu Halal Internasional dan Regional. *Jurnal Kajian Wilayah*, 12(1), 121. <https://doi.org/10.14203/jkw.v12i1.869>